

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

3.1 Mahasiswa

3.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender).

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya.

Rekrutmen mahasiswa (praja) dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN diumumkan secara terbuka melalui internet, radio, surat kabar, dan papan pengumuman.

a. Pengumuman harus mencantumkan informasi sebagai berikut :

1. batas usia
2. tinggi badan
3. Tahun ijazah/ STTB
4. Nilai rata-rata ijazah/STTB
5. Waktu pendaftaran
6. persyaratan peserta seleksi
7. materi ujian
8. waktu pelaksanaan ujian waktu pengumuman kelulusan

Tahapan –tahapannya:

1. Pendaftaran calon Praja IPDN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dan Kota
2. Penyampaian daftar nominatif pendaftar yang memenuhi syarat administrasi dari tim Penerimaan kabupaten kotake Tim Penerimaan
3. Penyampaian daftar nominatif peserta yang memenuhi syarat

administrasi untuk mengikuti Tes Psikologi kepada Menteri Dalam Negeri up Sekretaris Jendral

4. Tes Psikologi di Ibukota provinsi
5. Penyampaian Keputusan Mendagri kepada Gubernur tentang kelulusan tes Psikologi
6. Tes kesemaptan dan kesehatan di Ibukota Provinsi
7. Penyampaian daftar nominatif Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang memenuhi syarat Kesehatan dan kesemaptan dari Tim Penerimaan Provinsi kepada Mendagri Up sekretaris Jendral
8. Tes Akademik di Ibukota Provinsi
9. Penyampaian surat Mendagri kepada Gubernur tentang Peserta seleksi calon Praja IPDN yang memenuhi syarat untuk mengikuti penentuan akhir di kampus IPDN Jatinangor
10. Administrasi ,tes kesehatan dan Kesemaptan di IPDN Jatinangor Jabar
11. Penentuan akhir di kampus IPDN Jatinangor Sumedang
12. Keputusan Mendagri tentang kelulusan dan diterima menjadi calon Praja IPDN
13. Penyerahan Calon Praja IPDN ke Kampus IPDN Jatinangor.

PEMBIAYAAN :

1. Biaya seleksi Penerimaan calon praja IPDN dibebankan kepada APBN KEMENDAGRI, APBD,dan atau peserta seleksi
2. Biaya PNS tugas belajar dengan pembiayaan dari APBD masing-masing melalui PNBPN dan diselenggarakan di kampus IPDN Daerah.

3.1.2 Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Hal	Jumlah Mahasiswa pada PS:		Total Mahasiswa pada Fakultas
		Kebijakan Pemerintahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)
1	Program reguler	1. Mhs. baru bukan transfer	32 orang	32 orang
		2. Mhs. baru transfer	-	-
		3. Total mhs. reguler (<i>Student Body</i>)	32 orang	32 orang
2	Program non-reguler	1. Mhs. baru bukan transfer	-	-
		2. Mhs. baru transfer	-	-
		3. Total mhs. non-reguler (<i>Student Body</i>)	-	-

Catatan:

- (1) Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
- (2) Mahasiswa **program non-reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
- (3) Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa transfer. Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan transfer.

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN tidak pernah menerima mahasiswa (praja) pindahan / transfer

3.2 Lulusan

3.2.1 Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari **mahasiswa reguler bukan transfer** untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Program Studi	Rata-rata Masa Studi (tahun)	Rata-rata IPK Lulusan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Studi Kebijakan Pemerintahan	4.0	-
Rata-rata		4.0	-

Tabel 3.2.1. menunjukkan bahwa untuk tahun ini fakultas Politik Pemerintahan prodi Kebijakan Pemerintahan belum menghasilkan lulusan sehingga dalam tabel tersebut tidak tertulis rata-rata IPK lulusannya

3.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan, yang mencakup aspek: kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Aspek kewajaran: berdasarkan kurikulum program studi S1 disemua program studi bahwa lama studi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi adalah 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

Upaya pengembangan:Upaya fakultas dalam mengembangkan program kerja untuk meningkatkan indeks prestasi kumulatif adalah dengan menyelenggarakan tutorial bagi mata kuliah tertentu, program semester pendek, baik untuk mata kuliah baru atau mengulang.

Upaya peningkatan mutu: yang dilakukan oleh fakultas antara lain penataan mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi, sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi; melaksanakan program semester pendek, melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen; mengikutsertakan dosen serta praja dalam seminar nasional maupun internasional.

Kendala yang dihadapi: kemampuan bahasa Inggris dosen dan praja masih

terbatas. Di samping itu fakultas menyadari bahwa upaya peningkatan mutu ini belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan terkendala sistem pengelolaan anggaran di tingkat institut.